



Pemerintah Pangkas Danais Rp200 Miliar

PENGENCANGAN IKAT PINGGANG PEMERINTAHAN PRABOWO

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Rabu (22/1) dan langsung berlaku pada hari yang sama itu berdampak pada anggaran ke daerah.



JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto memangkas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Danais DIY) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp200 miliar.

Surya Dua Artha Simanjuntak & Akbar Evandio redaksi@jibinews.co

Pemangkasan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan pada Rabu (22/1).

Tak hanya Danais, transfer ke daerah (TKD) lainnya juga dipangkas termasuk juga anggaran kementerian/lembaga. Selain Danais, dana desa dan dana otonomi khusus juga dipangkas. *(selengkapnya lihat grafis)*

► Inpres yang baru pertama kali dikeluarkan Prabowo sejak menjabat Oktober tahun lalu itu mengatur efisiensi anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus.

► Presiden Prabowo ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan dalam APBN 2025.

Inpres yang baru pertama kali dikeluarkan Prabowo sejak menjabat Oktober tahun lalu itu mengatur efisiensi anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus. Dengan adanya Inpres itu, total anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp306,69 triliun. Total belanja negara yang disiapkan dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun.

► Halaman 10

PEMANGKASAN ANGGARAN KE DAERAH

- ◉ Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000 (**Rp13,9 triliun**).
- ◉ Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15.675.550.111.000 (**Rp15,6 triliun**).
- ◉ Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18.306.195.715.000 (**Rp18,3 triliun**).
- ◉ Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000 (**Rp509,4 miliar**).
- ◉ Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000 (**Rp200 miliar**).
- ◉ Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000 (**Rp2 triliun**).

INSTRUKSI PRABOWO KE KEPALA DAERAH

- ◉ Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
- ◉ Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
- ◉ Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium

yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

- ◉ Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
- ◉ Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran

belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

- ◉ Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
- ◉ Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

Sumber: Inpres No.1/2025 (Bisnits.com) Grafis: Harlan Jogja/Sunu Jatmiko



Pemerintah Pangkas...

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini. "[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun," tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1).

Dari total efisiensi itu, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun. Lalu, peninjauan transfer ke daerah TKD senilai Rp50,59 triliun. Terdapat delapan pihak yang diberi instruksi oleh Prabowo melalui Inpres efisiensi 2025 itu, yakni para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Mereka mendapatkan mandat untuk meninjau ulang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran. APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah (TKD) 2025 menjadi sasaran peninjauan itu.

Para menteri dan pimpinan lembaga harus melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja masing-masing K/L sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Perlu dicatat, identifikasi untuk penghematan anggaran itu tidak mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Artinya, gaji aparatur sipil negara (ASN) atau gaji PNS tidak akan terpengaruh perintah penghematan anggaran.

Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda). Instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorarium, hingga membatasi acara-acara seremonial.

Lakukan Efisiensi

Sekda DIY Beny Suharsono mengungkapkan salah satu dampak paling signifikan dari Inpres yang dikeluarkan Prabowo adalah pemotongan Danais sebesar Rp200 miliar dari total alokasi awal Rp1,2 triliun. "Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai amanat Inpres No. 1/2025. Danais yang paling jelas terdampak, dan beberapa program yang bisa ditunda akan kami tunda. Kami juga akan melakukan efisiensi belanja lain yang tidak langsung berkaitan dengan layanan publik," ujar Beny, Jumat.

Menurut Beny, Pemda DIY akan memprioritaskan efisiensi di sektor-sektor yang tidak mengganggu layanan publik.

"Kami harus merinci dengan sangat detail setiap kode belanja untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu. Pelaporan hasil efisiensi ini juga harus kami sampaikan paling lambat 14 Februari 2025, sesuai dengan ketentuan Inpres," ucap dia.

Lebih lanjut, Beny menjelaskan sebagian dana transfer dari Pemerintah Pusat juga belum sepenuhnya diterima oleh daerah, sehingga persiapan anggaran harus disesuaikan. "Kalau uangnya belum turun, tetapi belanja sudah disiapkan, ini bisa jadi masalah baru. Oleh karena itu, kami melakukan pengetatan anggaran yang luar biasa, termasuk pada Danais."

Selain Danais, belanja lain yang masuk dalam dana transfer Pusat juga terkena pemotongan. "Selain Rp200 miliar Danais yang terkena dampak, belanja lain yang sudah ditandai [dibintang] juga tidak bisa dibelanjakan. Jadi, meskipun tidak dilakukan efisiensi, belanja tersebut tetap tidak bisa digunakan," ungkap Beny.

Beny mengakui efisiensi anggaran ini berdampak pada sejumlah program, termasuk pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sudah mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem. "Hujan yang terus menerus menyebabkan longsor dan jalan makin rusak. Tetapi karena keterbatasan anggaran, belanja untuk perbaikan tidak bisa dilakukan segera. Meski demikian, kami berupaya memprioritaskan pelayanan publik dengan mengurangi belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan lain-lain," jelasnya.

Beny Suharsono, Sekda Provinsi DIY



Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho menyampaikan pengurangan Danais sebesar Rp200 miliar jelas memengaruhi rencana kerja yang telah disusun. "Danais awalnya ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun, dan dengan pengurangan ini menjadi Rp1 triliun. Tentu target yang sudah kami susun harus dikaji ulang," ujar Aris.

Menurut Aris, saat ini pihaknya masih menginventarisasi dampak pemotongan anggaran terhadap program-program prioritas. "Kami sedang memproses data dari semua OPD di DIY, termasuk kabupaten, kota, dan kalurahan. Semua aktivitas tahun 2025 sedang kami identifikasi untuk menentukan langkah yang akan diambil."

Tak Keberatan

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan presiden ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan dalam APBN 2025. "Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu," ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1).

Ia menjelaskan, penghematan anggaran tersebut untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/ lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya.

Setelâhnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran. Jika sudah disetujui parlemen, masing-masing kementerian/ lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. "Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya," jelas Deni.

Oleh sebab itu, dia menegaskan penghematan anggaran kementerian/ lembaga tersebut tidak memerlukan penerbitan APBN Perubahan 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tak ada keberatan atau penolakan yang disampaikan oleh Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, semua K/L te

Menurutnya, semua K/L telah sepakat untuk melakukan penghematan dan satu komando untuk menjalankan Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu demi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun. "Ndak ada [K/L] yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, enggak ada teman teman K/L merasa dikurangi [anggaran] karena ini semangatnya kita bersama-sama," ujarnya.

Dampak Ekonomi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, meyakini implikasi logis dari penghematan tersebut adalah peredaran uang akan semakin sedikit terutama di daerah-daerah. Ia melihat potensi beberapa proyek infrastruktur daerah bisa terhambat.

Bahkan, sambungnya, pemotongan anggaran perjalanan dinas akan menyebabkan pendapatan sektor pelayanan seperti hotel, restoran, hingga transportasi juga berkurang drastis. "Meskipun penghematan tadi uangnya digunakan misalnya untuk Program Makan Bergizi Gratis, tetapi tetap tidak bisa menggantikan banyak sektor yang sifatnya padat karya, yang terdampak oleh adanya penghematan ini," ujar Bhima.

Bhima melihat pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan semakin melambat akibat penghematan anggaran. (JIBI/Bisnis.com)